

KONSEP DASAR DAN APLIKASI



AKUNTANSI KEUANGAN

Lanjutan

Editor : GCAINDO



Ahalik | Elana Era Yusdita | Elly Astuti
Fitria Husnatarina | Umi Hanifah

Akuntansi Keuangan Lanjutan : Konsep Dasar dan Aplikasi

Penulis: Ahalik
Elana Era Yusdita
Elly Astuti
Fitria Husnatarina
Umi Hanifah

Editor: GCAINDO

Tata letak: GCAINDO
Desain sampul: GCAINDO

Diterbitkan melalui:
Bintang Semesta Media
Anggota IKAPI No. 147/DIY/2021
Jl. Karang Sari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773
Telepon: (0274) 4358369, Mobile: (0) 858-6534-2317
Email: redaksibintangpustaka@gmail.com
Website: www.bintangpustaka.com, www.pustakabintangmadani.com

Cetakan Pertama: 2022
Yogyakarta, Bintang Semesta Media 2022
ix + 63 halaman, 150 mm x 230 mm
ISBN 978-623-8015-19-1
Terbit: 13 Oktober 2022

Hak cipta © 2022 pada penulis.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Gambar pada sampul: pch vector (freepik), Luke Chesser (Unsplash).
Gambar pada awal setiap bab: Tyler Franta (Unsplash), Myriam Jessier (Unsplash), Karolina Grabowska (Pexels), Firmbee.com (Unsplash),
Andrea Piacquadio from Pexels.

Disclaimer GCAINDO sebatas melakukan *proof-reading*, cek kesalahan tulis, format tulisan, dan *layout setting* untuk tujuan kerapian dan artistik buku. Isi tulisan sepenuhnya adalah tanggung jawab Penulis. GCAINDO dan Penerbit tidak bertanggung jawab atas isi tulisan setiap Penulis.

Kata Pengantar

Pencatatan alur aktivitas keuangan berdasarkan identifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi dengan menggunakan jurnal secara sistematis dan kronologis dalam akuntansi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Di dalamnya tercakup pengelolaan keuangan entitas bisnis atas beragam aspek, seperti modal, hutang, kredit, pasar modal, aset, dan investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang bersifat komprehensif atas konsep dasar dan aplikasi akuntansi keuangan sangat penting bagi terselenggaranya bisnis yang keberlanjutan.

Buku yang ditulis secara kolaboratif oleh para penulis berdasarkan pengalaman profesional dan akademis mereka ini secara lugas dan cermat membahas prinsip dasar dan aplikasi akuntansi keuangan. Di dalamnya dibahas konsep dasar akuntansi keuangan dan konsep akuisisi antarperusahaan. Selanjutnya, strategi investasi pada entitas lain dan konsep neraca konsolidasi dipaparkan. Kemudian, penjelasan mengenai analisis akuntansi kas dan piutang diberikan sebelum ditutup dengan paparan mengenai laporan keuangan dalam mata uang asing.

Setelah membaca buku ini pembaca diharapkan agar mendapat pemahaman yang tepat, luas dan dalam atas konsep dasar dan aplikasi akuntansi keuangan.

GCAINDO

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Tabel | vii |
| Profil Penulis | viii |
| 1 Konsep dan Ruang Lingkup Akuntansi Keuangan | 1 |
| 1.1 Konsep dasar akuntansi keuangan | 2 |
| 1.2 Sifat-sifat dasar akuntansi keuangan | 3 |
| 1.3 Ruang lingkup teori akuntansi keuangan | 4 |
| 1.4 Pengertian akuntansi keuangan | 7 |
| 1.5 Fungsi utama akuntansi keuangan | 8 |
| 1.6 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi keuangan | 10 |
| 2 Aktiva Tak Lancar | 13 |
| 2.1 Pendahuluan | 14 |
| 2.2 Biaya perolehan aktiva tak lancar | 14 |
| 2.3 Depresiasi aktiva tak lancar | 16 |
| 2.4 Pertukaran aktiva tetap | 22 |
| 2.5 Penilaian aktiva tetap | 25 |
| 2.6 Pelepasan aktiva tetap | 27 |
| 3 Transaksi Persediaan Antarperusahaan | 31 |
| 3.1 Pendahuluan | 32 |
| 3.2 Eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak | 33 |
| 3.3 Transaksi penjualan persediaan | 33 |
| 3.3.1 Dampak terhadap pencatatan entitas induk | 33 |
| 3.3.2 Dampak terhadap jurnal eliminasi | 34 |
| 4 Analisis Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing) | 39 |
| 4.1 Pendahuluan | 40 |
| 4.2 Jenis sewa | 40 |
| 4.3 Ilustrasi sewa pembiayaan bagi lessee dan lessor | 41 |
| 4.4 Ilustrasi sewa operasi bagi lessee dan lessor | 44 |
| 5 Akuntansi Keuangan Sektor Publik | 45 |
| 5.1 Pendahuluan | 46 |
| 5.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah | 47 |
| 5.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah | 48 |
| 5.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah | 50 |
| 5.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah | 51 |
| 5.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah | 52 |
| 5.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 5.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah | 54 |
| 5.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah | 56 |
| 5.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah | 56 |
| 5.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi | 57 |
| Daftar Pustaka | 59 |
| Glosarium | 61 |
| Indeks | 63 |

Profil Penulis

Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS, CSRA, ACPA, SCL adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Palangka Raya dan saat ini juga bertugas sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya (2018–2023). Pendidikan terakhirnya ditempuhnya di Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2015). Ia dipercayakan sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah (2016–2021) dan aktif sebagai fasilitator dan Narasumber pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi di berbagai instansi. Saat ini ia juga adalah Koordinator Daerah kompartemen akademisi Forum Bumdes Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah (2019–2024).

Ely Astuti, S.Pd., M.Si. saat ini bekerja sebagai Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun, sejak 2015. Pendidikan S1 di selesaikannya pada Program Studi Pendidikan Akuntansi (S1), IKIP PGRI Madiun tahun 2011, Program Studi Magister Akuntansi (S2), Universitas Sebelas Maret tahun 2014, dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Bidang keahlian yang ditekuninya adalah akuntansi keuangan, pendidikan akuntansi dan komputerisasi akuntansi. Saat ini ia juga menjadi *Editor-in-Chief Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* (Sinta 2). Penghargaan yang pernah diperolehnya sebagai dosen adalah 1st Best Paper pada International Conference of Business Accounting and Economics tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Umi Hanifah, S.E., M.Ak. menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada Maret 2021 ia bergabung di Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai Dosen Tetap program studi S1 Akuntansi. Ia memegang jabatan struktural sebagai UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Fakultas Hukum dan Bisnis UDB. Sebagai UPPM ia sering mengikuti berbagai kompetisi penelitian dan PKM baik pendanaan internal maupun eksternal institusi. Tahun ini ia lolos pendanaan dari Kemenristek Dikti tahun 2022 untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Fokus PPM ia adalah berkaitan dengan sustainability dalam penelitiannya dan peningkatan UMKM pada bidang pengabdian. Ia juga aktif menulis jurnal diberbagai jurnal terakreditasi maupun ikut terlibat dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional.

Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, DipIFR, Asean CPA, CA adalah dosen tetap akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta dengan jenjang Lektor Kepala, partner di KAP MGN dan KJA Ahalik, serta konsultan dan trainer di bidang IFRS, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Perbanas Institute sebagai lulusan terbaik, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, Magister Akuntansi dari Universitas Mercubuana dan Program Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Ia juga memiliki sertifikasi di bidang akuntansi, yaitu CPMA dari IAMI, CPSAK dan CA dari Ikatan Akuntan Indonesia, CPA dari IAPI, Diploma of IFRS dari ACCA, dan Asean CPA dari ACPACC. Ia juga aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jakarta.

Elana Era Yusdita, S.E., M.S.A. saat ini bekerja sebagai Dosen Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Madiun sejak 2017. Pendidikannya diselesaikan di Universitas Negeri Malang (2011) di bidang Akuntansi (S.E.) dan Universitas Brawijaya (2016) di bidang Akuntansi (M.S.A.). Bidang keahliannya adalah sistem informasi akuntansi, aplikasi komputer, akuntansi keuangan lanjutan, dan akuntansi lembaga/instansi pemerintah. Karya yang telah ditulis berfokus mengenai kewirausahaan, akuntansi kearifan lokal serta teknologi dalam pendidikan akuntansi. Kini ia mencoba merintis kerjasama dengan desa-desa di sekitar Madiun untuk penelitian dan pengabdian di bidang akuntansi lembaga/instansi pemerintah melalui jalur MBKM.

13

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Elana Era Yusdita, S.E., M.S.A.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

— **Albert Einstein**



13.1 Pendahuluan

Akuntansi keuangan sektor publik untuk instansi pemerintah memiliki pencatatan unik. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pengakuan berbasis kas digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), sedangkan pengakuan berbasis akrual digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan operasional (LO). Sekali transaksi bisa jadi akan melibatkan dua kali pencatatan, yaitu penjurnalan pada LRA dan LO. Hal ini ditentukan oleh jenis transaksinya. Jika transaksi tersebut melibatkan realisasi anggaran pada sebuah instansi, baik kas masuk maupun keluar, maka transaksi tersebut pasti akan dicatat pada LRA. Jika tidak berhubungan dengan realisasi anggaran, maka cukup dicatat pada LO saja.

Penerapan pencatatan akuntansi unik ini karena pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini secara singkat adalah proses menentukan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan (2) berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana nomor 1 (Mardiasmo, 2018). Perbandingan antara anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pemerintah pusat dan daerah tertuang pada LRA. Struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, sehingga dibutuhkan penyesuaian atau konversi pos pendapatan dan belanja sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Ini dikarenakan dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan pusat dan daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini ada pada Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Peraturan-peraturan ini dapat diunduh secara gratis untuk dipelajari lebih lanjut secara mandiri.

Fokus bab ini adalah membahas akuntansi pemerintah daerah. Siklus pencatatan keuangan pada pemerintahan daerah dimulai dengan adanya bukti memorial, surat tanda setoran, setoran perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan (Erlina *et al.*, 2020). Berikut akan dibahas cara pengakuan, perhitungan, dan pencatatan untuk transaksi yang lazim terjadi pada

instansi pemerintah, beserta laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah

Pendapatan pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan secara singkat pada Tabel 13.1. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan.

Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah

| No | Permendagri nomor 21 Tahun 2011 | PP nomor 71 tahun 2010 | Jenis Pendapatan |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Pendapatan asli daerah | Pendapatan asli daerah | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba penyertaan pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat). |
| 2 | Dana perimbangan ^a | Pendapatan transfer ^b | ^a Dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. ^b Penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. |
| 3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Hibah dari pemerintah pusat atau daerah lain, lembaga swasta dalam negeri, kelompok maupun perorangan masyarakat, lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah untuk penanganan bencana alam. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. |

Pendapatan-LRA diakui ketika pendapatan tersebut diterima di rekening umum negara atau daerah secara tunai. Pendapatan-LO diakui saat timbul hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Kedua jenis pendapatan tersebut sama-sama mengukur pendapatan berdasarkan pendapatan bruto, kecuali tidak dapat diestimasi atau dianggarkan sebelumnya. Contoh kasus dan pencatatannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Mei 2022, Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota M menerima pajak hotel sebesar Rp.10.000.000,-.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Laporan operasional | | | |
| 5 Mei 2022 | Kas di kas daerah | Rp.10.000.000,- | |
| | Pendapatan pajak hotel-LO | | Rp.10.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 5 Mei 2022 | Estimasi Perubahan SAL | Rp.10.000.000,- | |
| | Pendapatan pajak hotel-LRA | | Rp.10.000.000,- |

Dapat kita lihat jurnal untuk LO dan LRA sebenarnya mirip. Pendapatan dibedakan dengan keterangan LO dan LRA, sedangkan akun “Kas” untuk LRA adalah “Estimasi Perubahan SAL”.

13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah

Belanja merupakan istilah dalam LRA, sedangkan beban dipakai dalam LO. Klasifikasi ringkas pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan secara singkat pada Tabel 13.2. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan.

Belanja-LRA diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah, sedangkan beban-LO diakui saat kewajiban muncul, ada konsumsi aset, serta ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sebesar nilai wajar yang dibayarkan atau akan dibayarkan. Beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyisihan piutang, dan transfer diakui pada PPKD. Beban pegawai dan barang diakui pada SKPD.

Pada tanggal 7 Mei 2022, bendahara pengeluaran membayar pembelian 50 rim kertas F4 seharga Rp.2.812.500,-. Nilai ini termasuk PPN 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Pertama, harus kita hitung unsur PPN dan PPh pasal 22 dari nominal transaksi tersebut. Jika harga sebelum pajak diberi simbol Y, maka persamaan yang dapat dibuat adalah:

$$2.812.500 = Y + (11\% \times Y) + (1,5\% \times Y)$$

$$2.812.500 = Y + 0,11Y + 0,015Y$$

$$2.812.500 = 1,125Y$$

$$2.500.000 = Y$$

Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah

| Permendagri nomor 21 tahun 2011 (Belanja) | PP nomor 71 tahun 2010 (Belanja) | PSAP nomor 12 paragraf 37-38 (Beban) |
|--|---|--|
| Belanja tidak langsung: a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi d. Belanja hibah e. Bantuan sosial f. Belanja bagi hasil g. Bantuan keuangan h. Belanja tak terduga | Belanja operasi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan sosial | a. Beban pegawai b. Beban barang c. Beban bunga d. Beban subsidi e. Beban hibah f. Beban bantuan sosial |
| Belanja langsung: a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal | Belanja modal: a. Belanja tanah b. Belanja peralatan dan mesin c. Belanja gedung dan bangunan d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan e. Belanja aset tetap lainnya f. Belanja aset lainnya | g. Beban penyusutan aset tetap atau amortisasi |
| | Belanja tak terduga | h. Beban tak terduga |
| | Transfer | i. Beban transfer |
| | Transfer atau bagi hasil ke desa: a. Bagi hasil pajak b. Bagi hasil retribusi c. Bagi hasil pendapatan lainnya | |

Kedua, unsur PPN dan PPh yang harus dipungut harus dicari nominalnya. Ketiga, jurnal yang dibuat berturut-turut untuk pembayaran pembelian kertas itu sendiri, pemungutan pajak atas pembelian kertas, dan pembayaran bendahara ke negara atas pemungutan pajak.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|---|---|----------------|----------------|
| Jurnal saat pembayaran pembefian kertas | | | |
| Laporan operasional | | | |
| 7 Mei 2022 | Beban bahan habis pakai-ATK | Rp.2.812.500,- | |
| | Kas di bendahara pengeluaran | | Rp.2.812.500,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 7 Mei 2022 | Belanja bahan habis pakai-ATK | Rp.2.812.500,- | |
| | Estimasi perubahan SAL | | Rp.2.812.500,- |
| Jurnal saat pajak dipungut di SKPD | | | |
| Laporan operasional | | | |
| 7 Mei 2022 | Kas di bendahara pengeluaran | Rp.312.500,- | |
| | Utang PPN (Rp.2.500.000,- x 11%) | | Rp.275.000,- |
| | Utang PPh Pasal 22 (Rp.2.500.000,- x 1,5%) | | Rp.37.500,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 7 Mei 2022 | Tidak ada jurnal | | |
| Jurnal saat pajak dibayarkan | | | |
| Laporan operasional | | | |
| 7 Mei 2022 | Utang PPN | Rp.275.000,- | |
| | Utang PPh Pasal 22 | Rp.37.500,- | |
| | Kas di bendahara pengeluaran | | Rp.312.500,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 7 Mei 2022 | Tidak ada jurnal | | |

Beberapa transaksi tidak memerlukan pemungutan pajak, misalnya pada transaksi pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik. Contoh di atas untuk memberikan gambaran penuh tentang transaksi di pemerintah daerah beserta kewajiban memungut pajak. Nama akun untuk mengakui pengeluaran pada jurnal LO selalu memakai “Beban”, sedangkan pada LRA memakai “Belanja”. Prosedur pembayaran pada belanja pada SKPD dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) belanja uang persediaan (UP) atau pergantian uang (GU) atau tambahan uang (TU), (2) belanja langsung (LS) yang dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung non gaji.

13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah

Pembiayaan dicatat oleh PPKD. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, yang penjelasannya ada pada Tabel 13.3. Pembiayaan diukur sesuai nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima oleh nilai sekarang kas

yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dengan menggunakan mata uang rupiah. Pencatatan pembiayaan dilakukan pada LO dan LRA.

Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah

| Penerimaan Pembiayaan | Pengeluaran Pembiayaan | Pembiayaan Neto |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pinjaman b. Penjualan obligasi pemerintah c. Hasil privatisasi perusahaan negara/daerah d. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga e. Penjualan investasi permanen lainnya f. Pencairan dana cadangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga b. Penyertaan modal pemerintah c. Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu d. Pembentukan dana cadangan | Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan |

Pada 11 Mei 2022, Pemerintah Kota M menerima pinjaman jangka panjang dari PD Bank Pasar Kota M sebesar Rp.500.000.000,-.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Laporan operasional | | | |
| 11 Mei 2022 | Kas di kas daerah | Rp.400.000.000,- | |
| | Kewajiban jangka panjang | | Rp.400.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 11 Mei 2022 | Estimasi perubahan SAL | Rp.400.000.000,- | |
| | Penerimaan pembiayaan-pinjaman | | Rp.400.000.000,- |

13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah

Persediaan merupakan barang yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan proses produksi, barang dalam proses produksi dan barang untuk disimpan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Persediaan diakui saat ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang dapat diukur secara andal, atau pada saat hak kepemilikan diterima. Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan atau biaya standar produksi atau nilai wajar. Metode pencatatan diperbolehkan menggunakan perpetual dan periodik dengan FIFO. Beban persediaan dicatat untuk LO, sedangkan LRA hanya menampung pencatatan ketika ada pembelian.

Pada 1 Mei 2022, persediaan pupuk di Diperta Kota M adalah 10 karung @Rp.100.000,-. Pada tanggal 15 Mei 2022 dibeli 20 karung @Rp.120.000,-. Pada 20 Mei 2022, 15 karung disalurkan kepada petani.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|---|---|----------------|----------------|
| Laporan operasional - Metode perpetual | | | |
| 15 Mei 2022 | Persediaan pupuk | Rp.2.400.000,- | |
| | Kas di bendahara pengeluaran (20 karung x Rp.120.000,-) | | Rp.2.400.000,- |
| 20 Mei 2022 | Beban persediaan | Rp.1.600.000,- | |
| | Persediaan pupuk (10xRp.100.000,-) + (5xRp.120.000,-) | | Rp.1.600.000,- |
| Laporan operasional - Metode fisik atau periodik | | | |
| 15 Mei 2022 | Persediaan pupuk | Rp.2.400.000,- | |
| | Kas di bendahara pengeluaran (20 karung x Rp.120.000,-) | | Rp.2.400.000,- |
| 20 Mei 2022 | Tidak ada jurnal | | |
| Laporan realisasi anggaran (baik perpetual maupun fisik) | | | |
| 15 Mei 2022 | Belanja persediaan | Rp.2.400.000,- | |
| | Estimasi perubahan SAL | | Rp.2.400.000,- |
| 20 Mei 2022 | Tidak ada jurnal | | |

Cara perhitungan beban persediaan:

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Metode perpetual | Jumlah nilai pada saat pemakaian | Rp.1.600.000,- |
| Metode fisik atau periodik | (nilai persediaan awal + nilai pembelian) - (jumlah persediaan akhir x harga beli terakhir) | = ((10xRp.100.000,-) + Rp.2.400.000,-) - ((10+20-15) x Rp.120.000,-) = Rp.1.600.000,- |

13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah

Sesuai PSAP nomor 6, metode pencatatan investasi tergantung dari prosentase kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki. Penjurnalan ada di PPKD. Investasi non permanen terdiri dari (1) pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, (2) investasi dalam obligasi atau surat utang negara (SUN), (3) proyek pembangunan, dan (4) penyertaan modal lainnya misalnya untuk upaya penyelamatan perekonomian. Investasi permanen terdiri dari: (1) penyertaan modal pemerintah daerah, dan (2) investasi permanen selain penyertaan modal.



Pada 19 Mei 2021, Pemerintah Kota M menginvestasikan dana di BUMD ABC sebesar Rp.35.000.000,- untuk kepemilikan 50%. Pada 31 Desember 2021, BUMD ABC mengumumkan laba sebesar Rp.10.000.000,- dan membagikan dividen sebesar Rp.6.000.000,-.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Laporan operasional - Metode ekuitas | | | |
| 19 Mei 2021 | Investasi- BUMD ABC | Rp.35.000.000,- | |
| | Kas di kas daerah | | Rp.35.000.000,- |
| 31 Des 2021 | Investasi- BUMD ABC | Rp.5.000.000,- | |
| | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO (50%xRp.10.000.000,-) | | Rp.5.000.000,- |
| 31 Des 2021 | Kas di kas daerah | Rp.3.000.000,- | |
| | Investasi- BUMD ABC (50%xRp.6.000.000,-) | | Rp.3.000.000,- |
| Laporan operasional - Metode biaya | | | |
| 19 Mei 2021 | Investasi- BUMD ABC | Rp.35.000.000,- | |
| | Kas di kas daerah | | Rp.35.000.000,- |
| 31 Des 2021 | Piutang lainnya | Rp.5.000.000,- | |
| | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LD (50%xRp.10.000.000,-) | | Rp.5.000.000,- |
| 31 Des 2021 | Kas di kas daerah | Rp.3.000.000,- | |
| | Piutang Lainnya (50%xRp.6.000.000,-) | | Rp.3.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran (baik ekuitas maupun biaya) | | | |
| 19 Mei 2021 | Pengeluaran pembiayaan-investasi | Rp.35.000.000,- | |
| | Estimasi perubahan SAL | | Rp.35.000.000,- |
| 31 Des 2021 | Tidak Ada Jurnal | | |
| 31 Des 2021 | Estimasi perubahan SAL | Rp.3.000.000,- | |
| | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA (50%xRp.6.000.000,-) | | Rp.3.000.000,- |

13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah

Jenis aset tetap yang dapat diakui dan cara pengukurannya terdapat pada Tabel 4. Penjurnalan saat perolehan aset tetap dilakukan dua kali, pada LO dan LRA. Ilustrasi jurnal mirip dengan bagian beban dan belanja. Transaksi aset tetap yang terjadi umumnya mengenai penambahan dan pengurangan nilai aset.

Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|--------------------------------|---|
| Tanah | Harga perolehan atau pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. |
| Peralatan dan Mesin | Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap dipakai. |
| Gedung dan bangunan | Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. |
| Jalan, jaringan, dan instalasi | Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap dipakai. |
| Aset tetap lainnya | Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. |

13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah

Dana cadangan dibuat untuk memenuhi keperluan dengan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan di jurnal pada saat pembentukan dana cadangan dan saat pencairan sebesar nilai nominalnya oleh PPKD. Kedua kejadian tersebut dicatat pada LO dan LRA karena melibatkan aliran keluar-masuk kas. Berikut contoh kasus dana cadangan.

Pada 6 Januari 2022, Pemerintah Kota M membuat dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Laporan operasional | | | |
| 6 Januari 2022 | Dana cadangan | Rp.1.000.000.000,- | |
| | Kas di kas daerah | | Rp.1.000.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 6 Januari 2022 | Pengeluaran pembiayaan-pembentukan dana cadangan | Rp.1.000.000.000,- | |
| | Estimasi perubahan SAL | | Rp.1.000.000.000,- |

Pada 26 Mei 2022, dana cadangan Pemerintah Kota M dicairkan Rp.400.000.000,- untuk pembangunan pasar.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| Laporan operasional | | | |
| 26 Mei 2022 | Kas di kas daerah | Rp.400.000.000,- | |
| | Dana cadangan | | Rp.400.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 6 Januari 2022 | Estimasi perubahan SAL | Rp.400.000.000,- | |
| | Penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan | | Rp.400.000.000,- |

Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah daerah

| No | Klasifikasi | Pengukuran |
|----|--|---|
| 1 | Aset tak berwujud a. Goodwill b. Hak paten atau hak cipta c. Royalti d. Perangkat Lunak Komputer e. Lisensi f. Hasil kajian dengan manfaat jangka panjang g. Aset tidak berwujud lainnya h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan | Sebesar harga perolehan, baik dengan pembelian maupun perolehan internal. |
| 2 | Tagihan penjualan angsuran | Nilai nominal kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara atau daerah. |
| 3 | Tuntutan ganti rugi | Nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara. |
| 4 | Kemitaan dengan pihak ketiga a. Bangun, kelola, serah (BKS) b. Bangun, serah, kelola (BSK) c. Kerja sama pemanfaatan (KSP) d. Sewa | Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. |
| 5 | Kas yang dibatasi penggunaannya | Nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening untuk pembiayaan kegiatan yang membutuhkan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. |
| 6 | Aset lain-lain | Nilai tercatat saat aset tersebut dihentikan penggunaannya dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. |

13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah

Klasifikasi aset lainnya ada pada Tabel 13.5. Jurnal pengakuan adanya tagihan penjualan angsuran, ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan penghentian aset tetap hanya melibatkan LO, tanpa LRA karena tidak melibatkan aliran keluar-masuk kas. Sedangkan, jurnal perolehan aset tak berwujud secara tunai melibatkan LO dan LRA.

13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah

Kewajiban yang ada di pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013 dapat diklasifikasikan pada Tabel 6. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau terjadi transaksi, baik dengan atau tanpa pertukaran, yang berkaitan dan diakui oleh pemerintah. Pencatatan kewajiban terdiri saat timbulnya kewajiban dan pada saat pembayaran. Pencatatan pada saat timbul kewajiban tidak melibatkan LRA karena tidak berkaitan dengan kas keluar.

Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah

| Kewajiban Jangka Pendek | | Kewajiban Jangka Panjang |
|---|---|--|
| PPKD | SKPD | PPKD |
| a. Utang bunga b. Bagian lancar utang jangka panjang c. Utang beban d. Utang jangka pendek lainnya | a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) b. Pendapatan diterima di muka c. Utang beban d. Utang jangka pendek lainnya | a. Utang dalam negeri b. Utang luar negeri c. Utang jangka panjang lainnya |

Pada tanggal 15 Mei 2022, CV Indah digunakan jasanya untuk mendekor ulang ruang rapat pendopo Pemerintah Kota M sebesar Rp.20.000.000,-. Rencananya fee akan dibayar pada 25 Mei 2022.

Transaksi tersebut harus dicatat di SKPD karena berhubungan dengan beban barang dan jasa.

| Tanggal | Uraian | Debit | Kredit |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Jumlah saat timbul kewajiban | | | |
| Laporan operasional | | | |
| 15 Mei 2022 | Beban renovasi | Rp.20.000.000,- | |
| | Kewajiban kepada pihak ketiga | | Rp.20.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 15 Mei 2022 | Tidak ada jurnal | | |
| Jumlah saat pelunasan ke pihak ketiga | | | |
| Laporan operasional | | | |
| 25 Mei 2022 | Kewajiban kepada pihak ketiga | Rp.20.000.000,- | |
| | Kas bendahara pengeluaran | | Rp.20.000.000,- |
| Laporan realisasi anggaran | | | |
| 25 Mei 2022 | Belanja renovasi | Rp.20.000.000,- | |
| | SILPA | | Rp.20.000.000,- |

13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi

Menurut PSAP nomor 1, paragraf 14, komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari gabungan pelaporan keuangan dan anggaran. Luaran siklus akuntansi instansi pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Bentuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dapat dilihat pada lampiran Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan anggaran dan realisasi pada LRA diungkapkan dan dijelaskan sebabnya pada CaLK. Konversi yang dilakukan karena perbedaan klasifikasi belanja juga harus diungkapkan pada CaLK. Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan disebut SiLPA (Sisa Lebih Pembayaran), sedangkan selisih kurang disebut SiKPA (Sisa Kurang Pembayaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe OS & Rasdianto (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik (I). Andi, Yogyakarta.

GLOSARIUM

PPKD Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

SKPD Satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, staf-staf ahli, sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, inspektorat daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan kelurahan atau desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| 13 Akuntansi Keuangan Sektor Publik..... | 147 |
| 13.1 Pendahuluan | 148 |
| 13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah | 149 |
| 13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah | 150 |
| 13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah..... | 152 |
| 13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah | 153 |
| 13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah | 154 |
| 13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah | 155 |
| 13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah | 156 |
| 13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah | 158 |
| 13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah | 158 |
| 13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi | 159 |

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah | 149 |
| Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah..... | 151 |
| Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah | 153 |
| Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan..... | 156 |
| Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah daerah..... | 157 |
| Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah | 158 |

